



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diperlukan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kebijakan Pengawasan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Daerah.
9. Pengawas adalah aparat pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Auditor dan Jabatan

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Monitoring adalah kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur :

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

#### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan resiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

#### Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019.

#### Pasal 5

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak yaitu pengawasan terhadap perangkat Daerah dan Desa.

#### Pasal 6

Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI LEBAK  
WAKIL,

Ttd

ADE SUMARDI

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 25



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG KAJIAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2019

I. KEGIATAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan revidi, meliputi:

1. revidi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. revidi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. revidi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. revidi KUA dan PPAS;
5. revidi KUPA dan PPAS;
6. revidi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. revidi LK SKPD;
9. revidi laporan kinerja;
10. revidi penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan

11. reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
5. penilaian internal zona integritas;
6. verifikasi LHKPN/LHKASN;
7. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. audit kinerja;
2. audit operasional;
3. audit dengan tujuan tertentu.

## II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

## III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
  - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
  - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
  - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
    - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
    - b. bagi hasil pajak daerah;
    - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
    - d. sumbangan pihak ketiga.
  3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
    - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
    - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
    - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
  4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
    - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
    - b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
    - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

## B. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko.

#### IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran aparat pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI LEBAK  
WAKIL,

Ttd

ADE SUMARDI